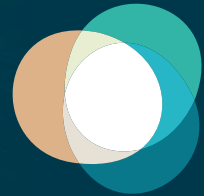


CRU

INDONESIA



CRU INDONESIA

**MEMPROMOSIKAN
PENDEKATAN PEKA KONFLIK
YANG KOLABORATIF DAN
BERBASIS BUKTI DALAM
MENANGANI KONFLIK LAHAN
DAN KEKAYAAN ALAM DI
INDONESIA.**



Berawal dari inisiatif KADIN Indonesia pada 2015, CRU bertransformasi menjadi CRU Indonesia pada 2024 untuk memperluas kerja strategisnya dalam merespons konflik serta membangun kapasitas pemangku kepentingan demi solusi jangka panjang. Saat ini, lebih dari 50 anggota dengan beragam latar belakang dan keahlian bekerja bersama untuk mewujudkan misi organisasi.

CRU Indonesia adalah organisasi nirlaba yang mendorong tata kelola kekayaan alam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan sistem penanganan konflik lahan dan kekayaan alam.

Kami mempromosikan pendekatan peka konflik yang kolaboratif, dialogis, dan berbasis bukti dalam menangani konflik.

PROGRAM DAN LAYANAN

1

2

Capacity Building

Menyediakan layanan peningkatan kapasitas bagi pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Kegiatan pelatihan dirancang secara partisipatif dan kontekstual sesuai kebutuhan lapangan.

Knowledge Management

Aktif mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan terkait konflik lahan dan sumber daya alam sebagai dasar pengambilan kebijakan dan intervensi yang berbasis bukti.

3

Penanganan Kasus Konflik Lahan dan Kekayaan Alam

Aktif terlibat dalam fasilitasi penyelesaian konflik, baik sebagai *neutral third party* yang secara langsung melaksanakan mediasi para pihak maupun sebagai lembaga pendukung pelaksanaan mediasi para pihak yang berkonflik.

4

Kepenasihatan dan Konsultasi

Menyediakan layanan penasihat (*advisory*) untuk menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan mitra dengan menaruh perhatian pada proses asesmen yang dirancang unik sesuai dengan tujuan dan kebutuhan mitra.

5

Audit dan Tinjau-ulang Sistem

Menyediakan dukungan peninjauan ulang atas sistem atau prakarsa pengelolaan konflik yang telah dikembangkan baik oleh pemerintah maupun dunia usaha untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya dan memastikan sistem tetap relevan.

CAPACITY BUILDING

Peningkatan kapasitas bagi pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal yang dirancang secara partisipatif dan kontekstual sesuai kebutuhan lapangan



Pelatihan Pendokumentasian dan Pelaporan Konflik

- Pelatihan bagi staf instansi pemerintah daerah dan nasional dalam mengidentifikasi, mendokumentasikan, serta melaporkan konflik tenurial dan sumber daya alam.
- Penguatan sistem informasi konflik melalui *template* pelaporan yang terstandarisasi



Human Rights Due Diligence (HRDD)

- Workshop dan bimbingan teknis tentang implementasi HRDD dalam sektor kehutanan, agribisnis, dan energi.
- Modul pelatihan termasuk: identifikasi risiko HAM, mitigasi, dan remedi.



Pelatihan Mediator Bersertifikat

- Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi mediator yang diakui secara nasional oleh Mahkamah Agung RI.
- Pembekalan pada teknik mediasi, negosiasi berbasis kepentingan, serta manajemen multipihak dalam konteks sumber daya.

KNOWLEDGE MANAGEMENT

Pengembangan dan penyebaran pengetahuan terkait konflik lahan dan sumber daya alam sebagai dasar pengambilan kebijakan dan intervensi yang berbasis bukti

Diseminasi Pengetahuan dan Pembelajaran

- Penjangkauan dan komunikasi kebijakan
- Penerbitan nawala elektronik bulanan, **Layang Damai**, terkait berbagai aspek tentang konflik lahan dan kekayaan alam di Indonesia.
- Webinar bulanan **Seka Sengketa**, sebuah *platform* digital untuk berbagi pembelajaran, bekerjasama dengan TMSHare dengan topik yang sejalan dengan topik **Layang Damai**, melibatkan berbagai narasumber berkompeten.

Kajian Kasus dan Kebijakan

- Kajian konflik sektoral dan regional, termasuk analisis akar konflik, aktor, dan dinamika relasi kuasa.
- Kajian kebijakan terkait perhutanan sosial, reforma agraria, dan pengakuan hak masyarakat adat.

Pengembangan Peta Indikatif Wilayah Rawan Konflik

- Peta berbasis Sistem Informasi Geografis atau *Geographic Information System (GIS)* yang menampilkan wilayah-wilayah dengan potensi konflik tinggi, digunakan untuk perencanaan mitigasi konflik.
- Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah serta *stakeholders* terkait untuk validasi data lapangan.



PENANGANAN KASUS KONFLIK LAHAN DAN KEKAYAAN ALAM

Aktif terlibat dalam fasilitasi penyelesaian konflik, baik sebagai neutral third party yang secara langsung melaksanakan mediasi para pihak maupun sebagai lembaga pendukung pelaksanaan mediasi para pihak yang berkonflik.

Pendampingan Teknis Pemerintah dan Pemangku Kepentingan

Dukungan teknis kepada Pemerintah dalam menangani konflik lahan dan kekayaan alam, serta penguatan kapasitas kelembagaan.

Kolaborasi Multipihak

Kemitraan dengan kementerian/lembaga, perusahaan, masyarakat sipil, dan lembaga donor untuk pengembangan sistem pendokumentasian, kanal pengaduan dan respon terhadap konflik yang berkelanjutan serta dapat diperluas pengembangannya.

Penanganan Konflik secara Netral dan Imparsial

- Kajian kasus sebagai bagian dari proses penanganan konflik
- Proses mediasi antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dalam konflik agraria dan kehutanan.
- Fasilitasi penyusunan *roadmap* penyelesaian konflik hingga perumusan kesepakatan bersama, serta pemantauan pelaksanaannya.

KEPENASIHATAN DAN KONSULTANSI

Untuk mendukung penyelesaian konflik pengelolaan lahan dan kekayaan alam di Indonesia, CRU menyediakan layanan kepenasehatan (*advisory*) untuk menyusun rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

Proses asesmen yang dirancang unik sesuai dengan tujuan dan kebutuhan

- Uji-tuntas (*due diligence*) kepatuhan terhadap prinsip-prinsip UNGPs dalam sistem manajemen usaha perusahaan;
- Kajian efektivitas dan daya tanggap sistem pengaduan keluhan (*grievance mechanism*) terkait kebijakan keberlanjutan perusahaan (*corporate sustainability policy*);
- Pengembangan sistem pengaduan (*grievance mechanisms*) sebagai sistem tanggap terhadap konflik pada tahap dini.
- Kajian dan rekomendasi dugaan konflik lahan dan kekayaan alam.



AUDIT DAN TINJAU-ULANG SISTEM

Menyediakan dukungan untuk proses peninjauan ulang atas sistem atau prakarsa pengelolaan konflik yang telah dibangun dan dikembangkan baik oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Peninjauan ulang dilakukan untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya dan memastikan sistem tetap relevan.

Layanan Audit dan Tinjau Ulang Sistem

- Audit dan tinjauan-ulang kebijakan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait UNGPs dan kebijakan keberlanjutan perusahaan.
- Audit dan tinjauan-ulang sistem pengaduan keluhan dan/atau sistem penanganan konflik.



**PENANGANAN KONFLIK
LAHAN DAN KEKAYAAN ALAM
YANG MENGEDEPANKAN
INDEPENDENSI, NETRALITAS
DAN IMPARSIALITAS SERTA
DAYA-JANGKAU DI WILAYAH
RAWAN KONFLIK.**

PORTOFOLIO PROYEK

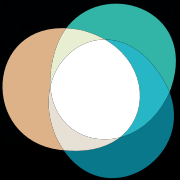
Capacity Building terkait
Pelaksanaan *Human Rights
Due Diligence* pada Operasi
Perusahaan

2025

Capacity Building dalam
Pendokumentasian dan
Pelaporan Konflik Lahan dan
Kekayaan Alam

Goodhope

2024



**Pengembangan Kerangka
Kerja Human Rights Due
Diligence (HRDD)**

PT. Astra Agro Lestari

2023

**Dukungan Teknis terkait
Pengembangan Peta Indikatif
Rawan Konflik Lahan dan
Kekayaan Alam kepada
Provinsi Jambi**

didukung Ford Foundation
Indonesia

2022-2023

**Dukungan Teknis terkait
Penanganan Konflik di
Kabupaten Malang (Jawa
Timur)**

Direktorat Penanganan Konflik
Tenurial dan Hutan Adat
(PKTHA), Ditjen PSKL, KLHK

2020-2021

**Kajian Kebijakan
Penghormatan Hak Asasi
Manusia (HAM)**

PT. Astra Agro Lestari

2022

**Dukungan Teknis terkait
Penanganan Konflik di
Batanghari (Jambi) dan
Jember (Jawa Timur) kepada
Gugus Tugas Reforma
Agraria (GTRA)**

didukung Ford Foundation
Indonesia

2021-2022

**Prakarsa Penanganan Konflik
Lahan dan Kekayaan Alam**

KADIN didukung UK Climate
Change Unit, UKCCU, GiZ, CLUA

2015 - 2020

MITRA KERJASAMA



Kamar Dagang dan Industri
(KADIN)



Indonesia Business Council
for Sustainable Development
(IBCSD)



Yayasan Puter Indonesia



Pusat Mediasi Nasional
(PMN)



Asosiasi Pengusaha Hutan
Indonesia (APHI)



Indonesia Institute for
Conflict Transformation
(IICT)



Astra Agro Lestari
(AAL)



KARSa



Terasmitra
(TMAssoc)



OASE



Jaringan Kerja Pemetaan
Partisipatif (JKPP)



Daemeter



Working Group
Tenure



Bali Lite
Institute



Mitra Aksi



Mitra Samya



Fakultas Hukum
Universitas Parahyangan



Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya



Goodhope
Group



MedArbID



Near2u
Global



Earthworm
Foundation



Proforest



Pusat Riset
Hukum Islam dan Adat
Universitas Syah Kuala



P4M



PT. Rimba Makmur Utama
(PT. RMU)



Urban and Regional
Development Institute
(URDI)



Indonesia Institute for
Conflict Transformation
(IICT)

TIM EKSEKUTIF



Arief Wicaksono
Direktur Eksekutif



Ilya M. Moeliono
Penasihat Senior



Rinawati Eko PL
Deputi Direktur



Beatrice M. Mailoa
Operations &
Finance Manager



Ginanjar Tamimy
Engagement &
Networking Manager



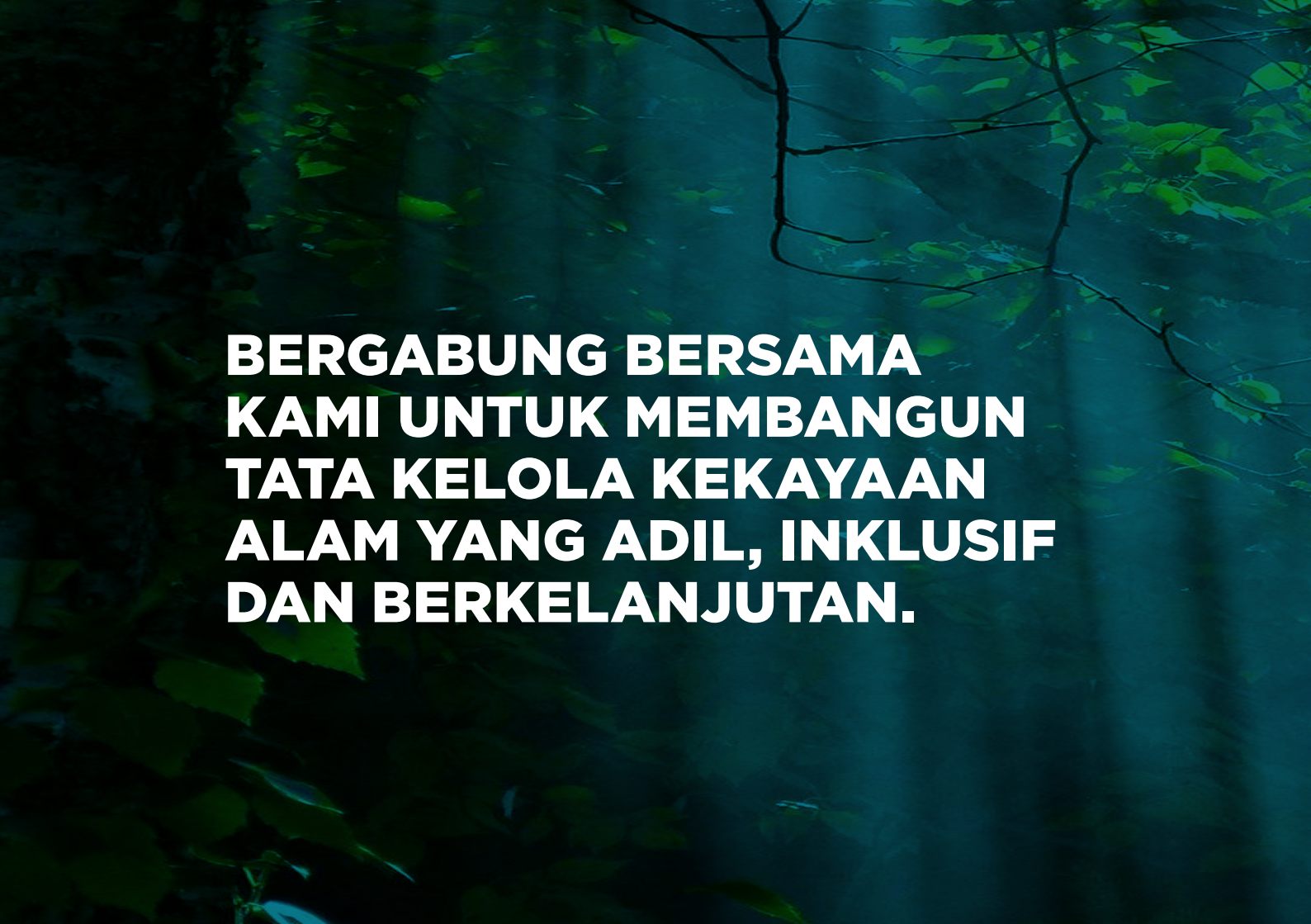
Yosigara Prihandika
Program Officer



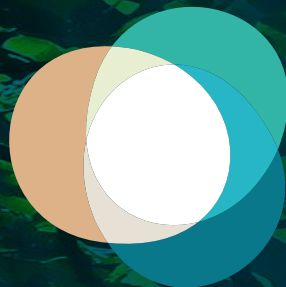
Agwina Dieta Sadikin
Monitoring Officer



Hatma Nova Kartikasara
Project Assistant



**BERGABUNG BERSAMA
KAMI UNTUK MEMBANGUN
TATA KELOLA KEKAYAAN
ALAM YANG ADIL, INKLUSIF
DAN BERKELANJUTAN.**



CRU
INDONESIA

HUBUNGI KAMI

📍 Jl. Danau Sentani no. 6-7
Duta Pakuan, Bogor Tengah
Kota Bogor, Jawa Barat 16129
Indonesia

✉ info@cruindonesia.id

🌐 <https://conflictresolutionunit.id>

📷 cruindonesia

